

Sandiaga: Pak Prabowo Tak Minta Mahar, tetapi Politik Itu Berbiaya

NURSITA SARI

Kompas.com - 12/01/2018, 12:37 WIB



Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/1/2018) malam.(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta [Sandiaga](#) Uno mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya. Hal itu bisa dibuktikan saat Gerindra turut mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI 2012 dan Anies Baswedan-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

"Enggak ada (mahar), enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional. Itu sudah dibuktikan waktu mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Namun, Sandiaga menyebutkan setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya. Kader Gerindra itu pun menyebutkan, dana yang dihabiskan untuk Pilkada DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar.

"Memang kalau politik itu berbiaya. Kemarin kami menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi, itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai nanti kami sudah mencalonkan, enggak memiliki pendanaan," kata dia.

Baca juga : [Mahalnya Ongkos Politik...](#)

Dia bercerita, sebelum diusung pada Pilkada DKI 2017, dirinya meyakinkan Prabowo bahwa dia memiliki ongkos politik. Karena itu, Prabowo pun yakin mengusung dirinya dan Anies.

"Saya waktu itu bisa meyakinkan Pak Prabowo, dan itu semua (dana) kami laporkan secara transparan, diaudit, dilaporkan ke KPK juga," ucap Sandiaga.

Menurut Sandiaga, proses tersebut juga dirasakan oleh bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said dan bakal calon gubernur Jawa Barat Mayjen (Purn) Sudrajat yang diusung Gerindra pada Pilkada 2018.

La Nyalla Mattalitti, seorang kader Gerindra, mendapatkan surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan kemenangan. Salah satu kelengkapan kemenangan, kata La Nyalla, ia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur.

Baca juga : [La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi](#)

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, pada 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla seperti dikutip *Tribunnews.com*, Kamis kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).